

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DPRD DKI Kembali Rumuskan Jalan Berbayar

◆ Cara Atasi Polusi di Ibu Kota

JAKARTA (Poskota) - DPRD DKI kembali membuka opsi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan di beberapa ruas jalan Ibu Kota. Langkah itu diambil untuk penanganan polusi udara di Jakarta yang kian parah.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, opsi penerapan ERP belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena langkah itu dianggap bisa menjadi sebagai salah satu upaya jangka panjang penanganan buruknya kualitas udara Jakarta. "Opsi ini akan kembali kami ambil untuk mengatasi kualitas udara yang ada di Jakarta," katanya, Selasa (20/6).

Menurut pria yang biasa disapa Pras, selain penerapan ERP, langkah solutif yang diinginkannya diterapkan di Jakarta yakni

soal peralihan ke kendaraan listrik dan meningkatkan kualitas transportasi massal. "Ya kita kan semua akan menuju kesitu ke mobil listrik, nah kita tetap berkampanye bagaimana masyarakat menggunakan mobil listrik," ujarnya.

"Yang kedua transportasi massal juga lagi berjalan, ya mudah-mudahan kan gak langsung tiba-tiba jadi kan lagi berjalan semua. Kan ada pembangunan MRT fase dua, entar di fase tiganya, semuanya lagi berjalan," sambung Pras.

Ditambahkan Pras, saat transportasi massal sudah kian terintegrasi dan masyarakat telah beralih ke kendaraan listrik, barulah Pemprov DKI melakukan kebijakan jangka panjang yang konkrit untuk tangani polusi udara.

"Dari situ baru penekanannya, aturannya ada mungkin jadi ERP atau apa karena

Jakarta sebagai penunjang Bekasi, Bogor, Tangsel, semua kan larinya ke sini," kata Pras.

Sebelumnya, Pras meminta Pemprov DKI meniru yang diterapkan oleh pemerintah Los Angeles (LA) Amerika Serikat yang menyediakan banyak fasilitas penunjang untuk mobil listrik.

Utamanya dengan memperbanyak tempat pengisian baterai agar warga mau beralih ke kendaraan listrik. "Pemerintah harus ada disitu, artinya mempermudah soal tempat pengisian.

Pras menilai saat ini tempat pengisian baterai untuk mobil listrik masih sangat minim di tempat umum. Hal itu yang membuat warga enggan beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. "Pemerintah wajib mengasih subsidi kepada masyarakat," tukasnya. (*/lfn)